

## RENCANA KINERJA TAHUNAN

OPD : BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Persentase aktifitas pejabat daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah yang dilayani.</li><li>- Persentase Aktifitas Pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.</li></ul>	<p>100%</p> <p>100%</p>
2	Meningkatkan Koordinasi dengan Perantau dan Pembinaan Generasi Muda Sumatera Barat di Perantauan.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jumlah Aktifitas Koordinasi Dengan Perantau yang dilaksanakan.</li><li>- Jumlah Pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan.</li></ul>	<p>13 kali</p> <p>4 kali</p>
3	Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah di Sumatera Barat</li><li>- Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat</li></ul>	<p>12 kali</p> <p>17 kali</p>
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD</li></ul>	68.00 (B)
5	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi</li></ul>	81,50 ( Baik )

Jakarta, Januari 2024

KEPALA BADAN PENGHUBUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT



**ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc.Sc. Ph.D**

Pembina Tk.I/NIP. 19800904 199810 1 002



**BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**RENCANA KERJA (RENJA)**  
**TAHUN 2024**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Keberhasilan kinerja suatu organisasi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan diukur melalui berbagai indikator-indikator dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan/evaluasi. Pengukuran kinerja tersebut merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan merupakan jembatan antara perencanaan strategi dan akuntabilitas. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya pembangunan merupakan unsur perencanaan yang mempengaruhi kelancaran serta pencapaian target yang akan direncanakan. Sumber daya tersebut meliputi : Modal, SDM, Teknologi, Organisasi/kelembagaan sedangkan perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan dasar manajemen perencanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan.

Dalam Undang-Undang ini pada ruang lingkupnya disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsure penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Intinya dokumen perencanaan pembangunan nasional yang terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mencakup : Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan periode 20 (duapuluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan periode 5 (lima) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP dan RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, yang memuat :

- *Kerangka ekonomi makro termasuk didalamnya arah kebijakan fiskal dan moneter.*
- *Prioritas pembangunan.*
- *Rencana kerja dan pendanaannya pemerintah dan partisipasi masyarakat.*

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada RPJP Daerah.

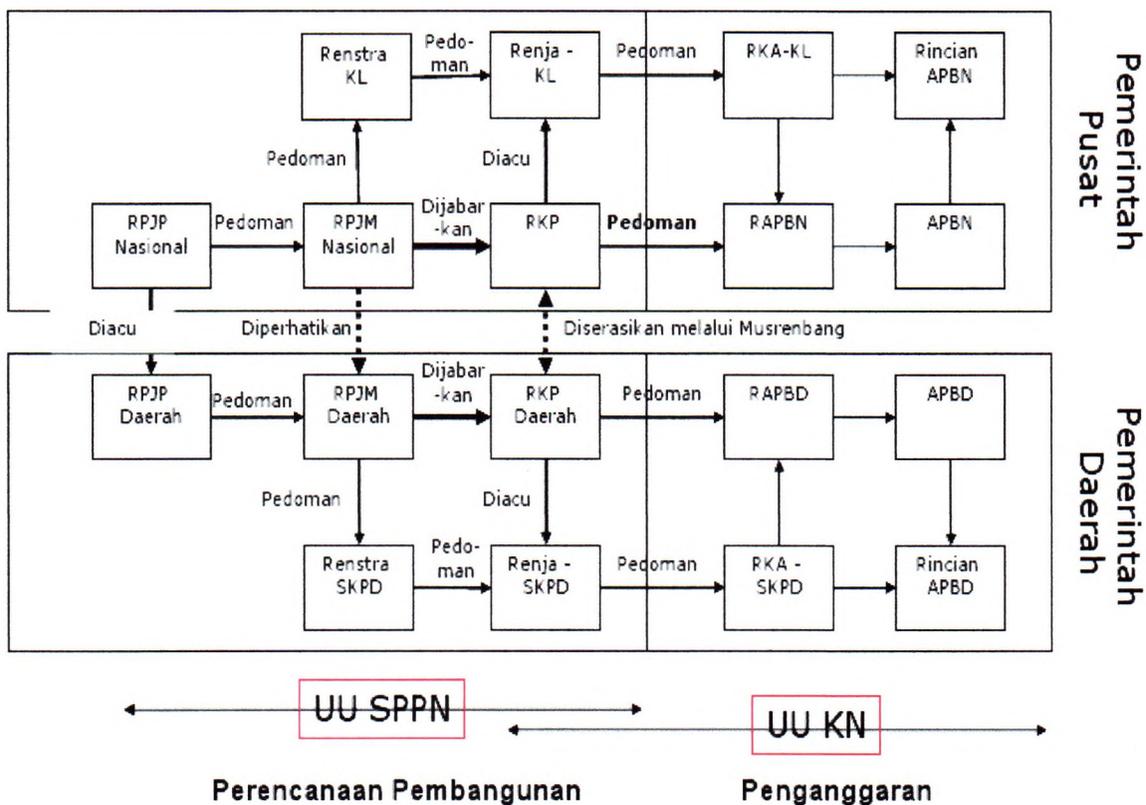
Rencana Strategis Badan/Dinas/Instansi yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Badan/Dinas/Instansi untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada RPJMD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

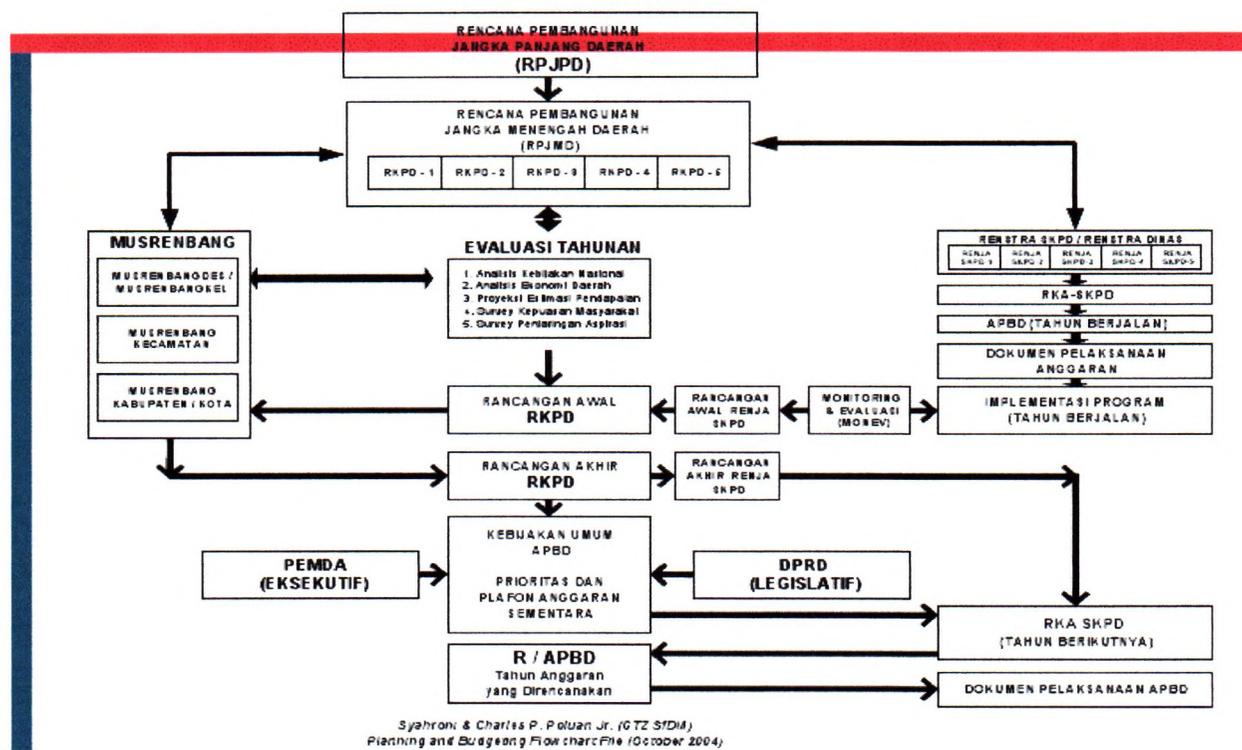
- RKPD pedoman bagi penyusunan RAPBD.
- RKPD memuat program dan kegiatan bersifat :
  - a. Terukur (*measurable*).
  - b. Dapat dilaksanakan (*workable*).

Rencana Kerja Badan/Dinas/Instansi yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Badan/Dinas/Instansi untuk untuk periode 1 (satu) tahun.

### Alur Perencanaan dan Penganggaran Jangka Panjang, Menengah & Tahunan



PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN DAERAH



Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikato rkinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang :sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran, dan rencana yang ingin dicapainya, selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan, dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektorlain.

**1. Sasaran.**

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

**2. Program.**

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategi. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapa isasaran yang telah ditetapkan.



### 3. Kegiatan.

Kegiatan adalah tindakan dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu, dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya. Dalam kegiatan ini terdiri atas sub kegiatan-sub kegiatan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pada suatu instansi.

### 4. Indikator Kinerja Kegiatan.

Indikator kinerja ialah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan dalam kelompok :

- a. Masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumberdaya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- b. Keluaran (outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
- c. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat (benefits) adalah kegunaan suatu keluaran (Outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- e. Dampak (impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja disetiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.

Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi, indikator kinerja dimaksud hendaknya spesifik dan jelas, dapat diukur secara objektif, relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan tidak bias.

**B. LANDASAN HUKUM**

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Pemerintah (Dinas/Badan/Intansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat), ada beberapa landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan serta penganggaran, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah

b

- Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 79);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
  16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Tatalaksana Pelayanan Tamu Pada Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
  17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai dokumen Perencanaan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat untuk periode 1 (satu) tahun.

#### **2. Tujuan**

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman perencanaan pembangunan tahunan dalam melaksanakan program/kegiatan pada tahun berikutnya (Tahun 2024).
- b. Untuk menetapkan target dan capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat.
- c. Sebagai salah satu sarana/wadah dalam menampung aspirasi masyarakat yang didapat dari evaluasi program/kegiatan tahun sebelumnya.

### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum

- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

**BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGHUBUNG TAHUN LALU**

- A. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2022 dan Capaian Renstra OPD
- B. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- C. Isu-Isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi OPD
- D. Review Terhadap Rancangan Awal OPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM KEGIATAN**

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
- B. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- C. Program dan Kegiatan

**BAB IV. PENUTUP**

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN LALU

### A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT

Dibandingkan tahun sebelumnya (2021), alokasi dana/anggaran pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat mengalami penambahan, adapun perbandingan alokasi dana/anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Program/Kegiatan dan Alokasi Dana Belanja Langsung**  
**Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 s/d 2022**

No	Tahun	Program	Kegiatan	Alokasi Dana (Rp)
1	2018	9	44	14.044.754.437
2	2019	9	38	17.525.768.591
3	2020	9	37	11.479.358.466
4	2021	2	9	12.766.532.931
5	2022	2	9	17.381.528.782

Sumber : Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat 2022

Pada Tahun Anggaran 2022, Badan Penghubung mendapat alokasi sebesar Rp.17.381.528.782,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.16.203.333.836,- (93,22%) yang terdiri dari :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp.13.107.970.284,- dengan uraian sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.95.537.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.91.421.836,- atau sebesar 95,69% yang terdiri atas beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Pada Sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.405.000,-.

- **Output** : Jumlah dokumen Renstra dan Renja Badan Penghubung yang disusun sebanyak 2 dokumen.
- **Outcome** : Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah sebesar 100%.
- **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp.3.149.800,- (92,51%).

b. Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD.

Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.42.891.000,-.

- **Output** : Jumlah dokumen DPA Badan Penghubung yang disusun sebanyak 1 dokumen.
- **Outcome** : Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah sebesar 100%.
- **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp.41.531.917,- (96,83%).

c. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.

Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan Anggaran sebesar Rp.42.891.000,-.

- **Output** : Jumlah dokumen perubahan DPA Badan Penghubung yang disusun sebanyak 1 dokumen.
- **Outcome** : Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah sebesar 100%.
- **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp.41.531.917,- (96,83%).

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.6.350.000,-.

- **Output** : Jumlah dokumen evaluasi (Realisasi Kinerja, Lakip, LPPD, LKPJ) Badan Penghubung yang disusun sebanyak 4 dokumen.
- **Outcome** : Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah sebesar 100%.
- **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp.5.005.900,- (78,83%).

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.6.421.760.509,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.5.936.124.995,- atau sebesar 92,44% yang terdiri atas beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.6.195.928.509,-.

- **Output** : Jumlah ASN Badan Penghubung dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya sebanyak 54 orang.
- **Outcome** : Persentase tertib administrasi keuangan di Badan Penghubung sebesar 100%.
- **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp.5.713.131.647,- (92,21%).

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.184.439.000,-.

- **Output** : Jumlah ASN Badan Penghubung yang mendapatkan honor sebanyak 11 orang.

- **Outcome** : Persentase tertib administrasi keuangan di Badan Penghubung sebesar 100%.
  - **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp.181.814.215,- (98,58%).
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.  
Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.14.714.000,-.
- **Output** : Jumlah Laporan Keuangan Badan Penghubung sebanyak 1 dokumen.
  - **Outcome** : Persentase tertib administrasi keuangan di Badan Penghubung sebesar 100%.
  - **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp.14.654.011,- (99,59%).
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.  
Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.26.679.000,-.
- **Output** : Laporan keuangan bulanan/triwulan/semester Badan Penghubung yang disiapkan sebanyak 18 dokumen.
  - **Outcome** : Persentase tertib administrasi keuangan di Badan Penghubung sebesar 100%.
  - **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp.26.525.122,- (99,42%).
3. Kegiatan Adminisrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.  
Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.298.607.500,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.262.279.076,- atau sebesar 87,83% yang terdiri atas beberapa sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.  
Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.41.118.000,-.
- **Output** : Jumlah dokumen usulan RKBMD pengadaan, pemindahan, pemanfaatan dan penghapusan serta perhitungan standar kebutuhan Badan Penghubung yang disusun sebanyak 5 dokumen.
  - **Outcome** : Persentase tertib administrasi barang milik daerah di Badan Penghubung sebesar 100%.
  - **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp.38.666.050,- (94,04%).
- b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.  
Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.163.742.000,-.
- **Output** : Jumlah dokumen pengamanan administrasi yang disusun sebanyak 1 dokumen.  
Jumlah unit yang dilakukan penjagaan sebanyak 30 unit.
  - **Outcome** : Persentase tertib administrasi barang milik daerah di Badan Penghubung sebesar 100%..
  - **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp.134.310.397,- (82,03%).

- c. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.  
Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.93.747.500,-.
- **Output** : Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban sebanyak 10 dokumen.
  - **Outcome** : Persentase tertib administrasi barang milik daerah di Badan Penghubung sebesar 100%.
  - **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp.89.302.629,- (95,26%).
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.  
Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.207.546.978,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.190.904.239,- atau sebesar 91,98% yang terdiri atas beberapa sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.  
Pada Sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.63.750.000,-.
- **Output** : Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya untuk 85 orang.
  - **Outcome** : Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah di Badan Penghubung sebesar 100%.
  - **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp.57.649.515,- (90,43%).
- b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.  
Pada Sub Kegiatan inidialokasikan anggaran sebesar Rp.112.376.978,-.
- **Output** : Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan Instansi lain sebanyak 2 orang.  
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan sebanyak 1 kali.
  - **Outcome** : Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah di Badan Penghubung sebesar 100%.
  - **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp.105.025.342,- (93,46%).
- c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.  
Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan Anggaran Sebesar Rp.31.420.000,-.
- **Output** : Jumlah Bimtek yang diikuti untuk 5 orang.
  - **Outcome** : Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah di Badan Penghubung sebesar 100%.
  - **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp.28.229.382,- (89,85%).
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.  
Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.923.189.145,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.890.240.465,- atau sebesar 96,43% yang terdiri atas beberapa sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.  
Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.16.562.400,-.

- **Output** : Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan sebanyak 240 buah.
  - **Outcome** : Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah di Badan Penghubung sebesar 100%.
  - **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp.16.452.660,- (99,34%).
- b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.  
Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.228.810.095,-.
- **Output** : Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia sebanyak 4 unit.
  - **Outcome** : Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah di Badan Penghubung sebesar 100%..
  - **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp.220.549.600,- (96,39%).
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.  
Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.109.029.300,-.
- **Output** : Jumlah alat tulis kantor yang tersedia sebanyak 4 jenis.  
Makanan dan minuman yang disediakan untuk pertemuan selama 12 bulan.
  - **Outcome** : Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah di Badan Penghubung sebesar 100%.
  - **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp.108.121.210,- (99,17%).
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.  
Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.77.884.550,-.
- **Output** : Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia sebanyak 3 jenis.
  - **Outcome** : Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah di Badan Penghubung sebesar 100%.
  - **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp.74.514.920,- (95,67%).
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.  
Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.580.000,-.
- **Output** : Jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang tersedia sebanyak 2 jenis.
  - **Outcome** : Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah di Badan Penghubung sebesar 100%.
  - **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp.5.304.000 (95,05%).
- f. Fasilitasi Kunjungan Tamu.  
Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan Anggaran sebesar Rp.51.000.000,-.
- **Output** : Tamu yang dilayani selama 12 bulan.
  - **Outcome** : Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah di Badan Penghubung sebesar 100%.

- **Realisasi** : Fisik 100% Keuangan Rp.50.978.816,- (99,96%).
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.  
Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.434.322.800,-.
- **Output** : Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi sebanyak 55 dokumen.
  - **Outcome** : Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah di Badan Penghubung sebesar 100%.
  - **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp.414.319.259,- (95,39%).
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.  
Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.345.384.890,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.927.927.278,- atau sebesar 82,20% yang terdiri atas beberapa sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.  
Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.217.164.890,-.
- **Output** : Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru sebanyak 20 unit.  
Jumlah PC konten creator dan website Badan Penghubung sebanyak 1 paket.
  - **Outcome** : Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan sebesar 100%.
  - **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp.216.361.500,- (99,63%).
- b. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.  
Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.471.290.000,-.
- **Output** : Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang disewa (kantor, rumah jabatan dan mess karyawan) sebanyak 3 unit.
  - **Outcome** : Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan sebesar 100%.
  - **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp.1.449.386.133,- (98,51%).
- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.  
Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.656.930.000,-.
- **Output** : Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor (pos satpam, tempat parkir motor dan landscape di Anjungan Sumatera Barat TMII sebanyak 5 paket.)
  - **Outcome** : Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan sebesar 100%.
  - **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp.262.179.645,- (39,91%).

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.184.724.262,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.166.299.592,- atau sebesar 99,16% yang terdiri atas beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan Anggaran sebesar Rp.14.263.500,-.

- **Output** : Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun sebanyak 185 surat.
- **Outcome** : Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100%.
- **Realisasi** : Fisik 100 %, Keuangan Rp.14.260.000,- (99,98%).

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.330.938.000,-.

- **Output** : Jumlah tagihan air yang dibayarkan sebesar 5300 meter kubik.  
Jumlah tagihan internet dan VPN-IP yang dibayarkan sebesar 100 mbps.  
Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan sebesar 180.000 KVA.  
Jumlah tagihan telepon yang dibayarkan sebanyak 5 rekening.  
Jumlah tagihan TV kabel yang dibayarkan sebanyak 2 unit.
- **Outcome** : Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100%.
- **Realisasi** : Fisik 100 %, Keuangan Rp.327.460.209,- (98,95%).

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Pada Sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.839.522.762,-

- **Output** : Dukunganpenerapan new normal selama 12 bulan.
- **Outcome** : Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100%.
- **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp.1.824.579.383,- (99,19%).

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.631.220.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.619.816.053,- atau sebesar 99,65% yang terdiri atas beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan.

Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.263.750.000,-.

- **Output** : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara sebanyak 22 unit.
- **Outcome** : Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik sebesar 100%.
- **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp.236.162.049,- (89,54%).

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.31.070.000,-.

- **Output** : Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 51 unit.
- **Outcome** : Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik sebesar 100%.
- **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp.22.968.600,- (73,93%).

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.336.400.000,-.

- **Output** : Jumlah Gedung Anjungan Sumatera Barat di TMII yang dipelihara sebanyak 1 unit.  
Jumlah gedung Asrama Mahasiswa Bogor dan Yogyakarta yang dipelihara sebanyak 2 unit.
- **Outcome** : Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik sebesar 100%.
- **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp.335.852.655,- (99,84%).

II. Program Pelayanan Penghubung Rp.4.273.558.498,- dengan uraian sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelayanan Penghubung.

Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.4.273.558.498,-dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.4.143.153.051,- atau sebesar 96,95% yang terdiri atas beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat.

Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.61.250.000,-.

- **Output** : Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan Badan Penghubung selama 12 bulan.
- **Outcome** : Persentase meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan sebesar 100%.
- **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp.53.570.000,- (87,46%).

b. Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Pemerintah.

Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.655.087.300,-.

- **Output** : Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga/Lembaga Asing dan Pemerintah Provinsi Lainnya,

Masyarakat serta Pemangku Kepentingan Lainnya sebanyak 6 kali.

Pembinaan Generasi Muda Rantau Sumatera Barat sebanyak 3 kali.

Rapat Koordinasi Badan Penghubung se Indonesia sebanyak 1 kali.

Sosialisasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Perantau dan Masyarakat serta Pemangku Kepentingan Lainnya sebanyak 2 kali.

- **Outcome** : Persentase meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan sebesar 100%.
  - **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp.651.962.837,- (99,52%).
- c. Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni dan Budaya.
- Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.897.985.800,-.
- **Output** : Meningkatkan promosi potensi dan penyebaran informasi daerah diluar Sumatera Barat sebanyak 6 kali.
  - **Outcome** : Persentase meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan sebesar 100%.
  - **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp.896.097.192,- (99,79%).
- d. Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya.
- Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.66.438.800,-.
- **Output** : Penyelenggaraan pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya.
  - **Outcome** : Persentase meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan sebesar 100%.
  - **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp.66.108.075,- (99,50%).
- e. Koordinasi dan Sikronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung.
- Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.592.796.598,-.
- **Output** : Media informasi dan publikasi program dan kegiatan pemerintah daerah diluar Sumatera Barat selama 12 bulan.  
Penyelenggaraan dan koordinasi Sumbar Hub selama 12 bulan.  
Penyelenggaraan pelayanan kedinasan selama 12 bulan.
  - **Outcome** : Persentase meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan sebesar 100%.
  - **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp.2.475.414.947,- (95,47%).

Selanjutnya hal berkenaan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat serta pencapaian renstra sampai tahun 2022 tertuang pada **(Tabel T.C-29)**.

Namun dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka terdapat perubahan pada penempatan program dan kegiatan.

TABEL T.C-29  
 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA BADAN PENGHUBUNG S/D TAHUN 2022  
 PROVINSI SUMATERA BARAT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2021-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
5.07	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
5.07	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.07	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah.	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Badan Penghubung yang disusun.	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	4 dokumen	40,00
5.07	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Badan Penghubung yang disusun.	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40,00
5.07	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA Badan Penghubung yang disusun.	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40,00

5.07	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi (Realisasi Kinerja, LAKIP, LPPD, LKPJ) Badan Penghubung yang disusun.	20 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	8 dokumen	40,00
5.07	01	1	02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.07	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah ASN Badan Penghubung dan calon ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya.	263 orang	53 orang	54 orang	100	54 orang	104 orang	39,54
5.07	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN Badan Penghubung yang mendapatkan honor.	55 orang	11 orang	11 orang	100	11 orang	22 orang	40,00
5.07	01	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Badan Penghubung.	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40,00
5.07	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester Badan Penghubung yang disiapkan.	90 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	100	18 dokumen	36 dokumen	40,00
5.07	01	1	03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.07	01	1	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen usulan RKBMD, pengadaan, pemindahtanganan, pemanfaatan dan penghapusan serta perhitungan standar kebutuhan Badan Penghubung yang disusun.	25 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100	5 dokumen	10 dokumen	40,00
5.07	01	1	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan administrasi yang disusun.	150 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	100	30 dokumen	59 dokumen	39,33
						Jumlah unit yang dilakukan penjiagaan.	150 unit	30 unit	30 unit	100	30 unit	59 unit	39,33

6

5.07	01	1	03	06	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penerbitan.	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40,00
5.07	01	1	05		<b>Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
25.07	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas beserta kelengkapannya yang disediakan	425 stel	51 stel	85 stel	85 stel	100	-	85 stel	20,00
5.07	01	1	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan dan yang diikuti	5 kali	1 kali	1kali	1 kali	100	1 kali	2 kali	20,00
5.07	01	1	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN BPHB yang mengikuti Bimtek	25 orang	5 orang	5 orang	5 orang	100	5 orang	10 orang	40,00
5.07	01	1	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.07	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12bulan	24 bulan	40,00
5.07	01	1	06	03	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga yang tersedia	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24 bulan	40,00
5.07	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor yang tersedia	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24 bulan	40,00
						Makanan dan minuman yang di sediakan untuk pertemuan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24 bulan	40,00
5.07	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24 bulan	40,00
5.07	01	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia	10 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	4 jenis	40,00

6

5.07	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan dan minuman yang di sediakan untuk pertemuan dan tamu	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24 bulan	40,00
5.07	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	100	55 dokumen, 12 bulan	24 bulan	40,00
5.07	01	1	07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5.07	01	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Gedung Kantor yang diadakan	115 unit	23 unit	21 unit	21 unit	100	100	21 unit	44 unit	38,26
5.07	01	1	07	06	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang disewa (kantor, rumah jabatan dan mess karyawan).	-	-	3 unit	3 unit	100	100	3 unit	3 unit	50,00
5.07	01	1	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan Pagar pada Asrama Mahasiswa Bogor dan Yogyakarta yang tersedia	2 unit	2 unit	-	-	-	-	-	-	-
5.07	01	1	08		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
5.07	01	1	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terdistribusinya surat-surat Kantor	925 kali	185 kali	185 surat	185 surat	100	100	185 surat	370 surat	40,00

5.07	01	1	08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rekening Tagihan yang dibayarkan (Telpon, Air, Listrik, internet VVN-IP SIPKD, TV Kabel)	60 bulan	12 bulan	12 bulan (5300 meter kubik, 100 mbps, 180.000 KVA, 5 rekening telepon, 2 TV kabel)	12 bulan (5300 meter kubik, 100 mbps, 180.000 KVA, 5 rekening telepon, 2 TV kabel)	100	12 bulan (5300 meter kubik, 100 mbps, 180.000 KVA, 5 rekening telepon, 2 TV kabel)	24 bulan	40,00
5.07	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Dukungan Penerapan New Normal	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24 bulan	40,00
						Honorarium Petugas Teknis Lapangan	60 bulan (1 orang)	12 bulan (1 orang)						
						Honorarium PTT	60 bulan (1 orang)	12 bulan (1 orang)						
						Jasa Kesehatan Jasmani (Senam Mingguan)	60 bulan	12 bulan						
						Jasa Kesehatan Rohani	60 bulan	12 bulan						
						Jasa Pengamanan	60 bulan(7 orang)	12 bulan (7 orang)						
						Jasa Rohaniwan	60 bulan	12 bulan						
						Jasa sopir	60 bulan (9 orang)	12 bulan (9 orang)						
						Petugas kebersihan	60 bulan (5 orang)	12 bulan (5 orang)						
5.07	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.07	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan operasional yang dipelihara	100 unit	20 unit	20 unit	20 unit	100	20 unit	40 unit	40,00
5.07	01	1	09	06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan Mesin Kantor Lainnya	60 bulan	12 bulan	51 unit, 12 bulan	51 unit, 12 bulan	100	51 unit, 12 bulan	24 bulan	40,00

5.07	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Asrama Mahasiswa Bogor dan Yogyakarta yang dipelihara Gedung Kantor Anjungan Sumatera Barat yang dipelihara	10 unit 5 unit	2 unit 1 unit	2 unit 1 unit	2 unit 1 unit	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100 100	2 unit 1 unit	2 unit 1 unit	4 unit 2 unit	40,00 40,00	
5.07	02				<b>Program Pelayanan Penghubung</b>	<b>Persentase meningkatnya pelayanan kedinasan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
5.07	02	1	01	01	<b>Pelaksanaan Pelayanan Penghubung</b>	<b>Persentase meningkatnya pelayanan kedinasan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
5.07	02	1	01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	Asrama Mahasiswa Yogyakarta dan Bogor yang Terkelola Sewa kantor, rumah jabatan dan mess karyawan yang tersedia selama 1 Tahun Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang dilakukan Badan Penghubung	60 bulan 60 bulan 60 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
5.07	02	1	01	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Fasilitasi Pelayanan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 bulan	12 bulan	12 kali, 12 bulan	12 kali, 12 bulan	100	100	100	100	12 kali, 12 bulan	12 kali, 12 bulan	24 bulan	40,00	
5.07	02	1	01	03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Penyelenggaraan Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	30 kegiatan	5 kegiatan	6 kali	6 kali	100	100	100	100	6 kali	6 kali	12 kali	40,00	
5.07	02	1	01	04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Penyelenggaraan Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100	100	100	100	1 kali	1 kali	2 kali	40,00	
5.07	02	1	01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	100	100	100	12 bulan	12 bulan	24 bulan	40,00	

Untuk lebih jelasnya Perkiraan realisasi anggaran Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Capaian Program dan Kegiatan Badan Penghubung Tahun Anggaran 2022**

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			Fisik		Keuangan		
			Rp.	%	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>17.381.528.782</b>	<b>100</b>	<b>16.203.333.836</b>	<b>93,22</b>	<b>1.178.194.946</b>	
I.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	<b>13.107.970.284</b>	<b>100</b>	<b>12.060.180.785</b>	<b>92,01</b>	<b>1.047.789.499</b>	
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.</i>	<b>95.537.000</b>	<b>100</b>	<b>91.421.836</b>	<b>95,69</b>	<b>4.115.164</b>	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	3.405.000	100	3.149.800	92,51	255.200	
2.	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD.	42.891.000	100	41.531.917	96,83	1.350.083	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.	42.891.000	100	41.734.219	97,30	1.156.781	
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	6.350.000	100	5.005.900	78,83	1.344.100	
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.</i>	<b>6.421.760.509</b>	<b>100</b>	<b>5.936.124.995</b>	<b>92,44</b>	<b>485.635.514</b>	
5.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	6.195.928.509	100	5.713.131.647	92,21	482.796.862	
6.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	184.439.000	100	181.814.215	98,58	2.624.785	
7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	14.714.000	100	14.654.011	99,59	59.989	
8.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD.	26.679.000	100	26.525.122	99,42	153.878	
	<i>Administrasi Barang Daerah pada Perangkat Daerah.</i>	<b>298.607.500</b>	<b>100</b>	<b>262.279.076</b>	<b>87,83</b>	<b>36.328.424</b>	
9.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.	41.118.000	100	38.666.050	94,04	2.451.950	
10.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.	163.742.000	100	134.310.397	82,03	29.431.603	
11.	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.	93.747.500	100	89.302.629	95,26	4.444.871	
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.</i>	<b>207.546.978</b>	<b>100</b>	<b>190.904.239</b>	<b>91,98</b>	<b>16.642.739</b>	
12.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya.	63.750.000	100	57.649.515	90,43	6.100.485	
13.	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan.	112.376.978	100	105.025.342	93,46	7.351.636	
14.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	31.420.000	100	28.229.382	89,85	3.190.618	

	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah.</b>	<b>923.189.145</b>	<b>100</b>	<b>890.240.465</b>	<b>96,43</b>	<b>32.948.680</b>
15.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	16.562.400	100	16.452.660	99,34	109.740
16.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	228.810.095	100	220.549.600	96,39	8.260.495
17.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	109.029.300	100	108.121.210	99,17	908.090
18.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	77.884.550	100	74.514.920	95,67	3.369.630
19.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.	5.580.000	100	5.304.000	95,05	276.000
20.	Fasilitasi Kunjungan Tamu.	51.000.000	100	50.978.816	99,96	21.184
21.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	434.322.800	100	414.319.259	95,39	20.003.541
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</b>	<b>2.345.384.890</b>	<b>100</b>	<b>1.927.927.278</b>	<b>82,20</b>	<b>417.457.612</b>
22.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	217.164.890	100	216.361.500	99,63	803.390
23.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	1.471.290.000	100	1.449.386.133	98,51	21.903.867
24.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	656.930.000	100	262.179.645	39,91	394.750.355
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</b>	<b>2.184.724.262</b>	<b>100</b>	<b>2.163.094.121</b>	<b>99,01</b>	<b>21.630.141</b>
25.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.263.500	100	14.260.000	99,98	3.500
26.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	330.938.000	100	327.460.209	98,95	3.477.791
27.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.839.522.762	100	1.824.579.383	99,19	14.943.379
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>631.220.000</b>	<b>100</b>	<b>594.983.304</b>	<b>94,26</b>	<b>36.236.696</b>
28.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	263.750.000	100	236.162.049	89,54	27.587.951
29.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	31.070.000	100	22.968.600	73,93	8.101.400
30.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	336.400.000	100	335.852.655	99,84	547.345
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>	<b>4.273.558.498</b>	<b>100</b>	<b>4.143.153.051</b>	<b>96,95</b>	<b>130.405.447</b>
	<b>Pelaksanaan Pelayanan Penghubung</b>	<b>4.273.558.498</b>	<b>100</b>	<b>4.143.153.051</b>	<b>96,95</b>	<b>130.405.447</b>
31.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat.	61.250.000	100	53.570.000	87,46	7.680.000
32.	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat.	655.087.300	100	651.962.837	99,52	3.124.463

33.	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya.	897.985.800	100	896.097.192	99,79	1.888.608
34.	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya.	66.438.800	100	66.108.075	99,50	330.725
35.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung.	2.592.796.598	100	2.475.414.947	95,47	117.381.651

Sumber : Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2022

**B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD**

Capaian kinerja pelayanan OPD dapat diukur berdasarkan indikator kinerja dari kegiatan pada OPD. Sedangkan Indikator suatu kegiatan OPD terkait erat dengan kondisi tugas dan fungsi OPD.

Jika dibandingkan dengan pencapaian realisasi sasaran pada Tahun 2021, realisasi pencapaian sasaran dan penyerapan dana (keuangan) Tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

**Tabel 2.2**  
**Perbandingan Alokasi Dana, Pencapaian Sasaran Serta Realisasi Penyerapan Dana/Anggaran Tahun 2018 s/d 2022**

Tahun	Alokasi Dana/Anggaran	Pencapaian Sasaran (%)	Realisasi Program/Kegiatan		
			Fisik (%)	Keuangan (%)	%
2018	14.044.754.437	100	98.42	12.725.909.701	90.61
2019	17.525.768.591	100	99.77	15.864.930.693	90.52
2020	11.479.358.446	100	94.04	10.786.325.298	93.96
2021	12.766.532.931	100	97.84	12.490.372.903	97,84
2022	17.381.528.782	100	100	16.203.333.836	93,22

Sumber : Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2022

Perbandingan pencapaian sasaran strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dan Tahun 2022 yaitu :

**Tabel 2.3**  
**Perbandingan Realisasi Tingkat Capaian 2021 s/d 2022**

No	Sasaran Strategis	Realisasi Tingkat Capaian	
		Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Mewujudkan kelancaran kegiatan Pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah : a. Persentase aktifitas pejabat daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah yang dilayani.	100%	100%



	b. Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.	100%	100%
2.	Meningkatkan koordinasi dengan perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di perantauan: a. Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan. b. Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan.	100% -	117% 100%
3.	Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat : a. Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat. b. Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat.	150% 80%	117% 100%
4.	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja organisasi : Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.	93,81%	95,18%
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi.	-	108,95%

Sumber : Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, 2022

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja pada Tahun 2022 telah baik terbukti dari capaian program dan kegiatan yang sebagian besar telah mencapai 100%, bahkan ada yang melebihi 100%, sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Tahun 2021-2026. Namun untuk nilai akuntabilitas kinerja organisasi capaian kinerja belum mencapai 100% (95,18%).

Indikator dan tolok ukur kinerja yang digunakan oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penghubung sebagai berikut :

**Tugas Pokok :**

"Membantu Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Jakarta"

**Fungsi :**

- a. Penyelenggaraan urusan humas dan protokoler pejabat daerah di Jakarta.
- b. Memfasilitasi hubungan kerja pejabat daerah dan koordinasi antar lembaga di Jakarta.
- c. Penyelenggaraan promosi daerah di Jakarta.
- d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perlengkapan, dan aset kantor.
- e. Melaksanakan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, ketatalaksanaan dan penyusunan rencana dan program kantor.
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- g. Pembinaan jabatan fungsional.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Berdasarkan capaian kinerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Terselenggaranya proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan dengan telah disusunnya dengan baik Dokumen Renstra, Renja, RKT, IKU, PK, DPA, DPA Perubahan serta Dokumen LAKIP, LPPD dan LKPJ pada Badan Penghubung.
- b. Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan bagi ASN Badan Penghubung selama 1 (satu) tahun dan lancarnya pembayaran honorarium yang diiringi dengan telah dilakukannya koordinasi-koordinasi dalam penyusunan Laporan Keuangan baik Laporan Keuangan bulanan, triwulan, semester maupun akhir tahun.
- c. Terlaksananya perencanaan barang milik daerah dengan telah disusunnya dokumen kebutuhan barang milik daerah serta terlaksananya pembayaran asuransi barang milik daerah sebagai salah satu usaha pengamanan barang milik daerah dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Selain hal diatas terlaksananya pengadaan barang milik daerah dan pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang kelancaran dan penopang pelaksanaan tugas pelayanan.
- d. Lancarnya pengurusan dan pendataan serta penataan bidang kepegawaian bagi ASN pada badan penghubung sehingga ASN tidak mendapatkan kendala untuk urusan kepegawaian dan dilain sisi peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga terus di tingkatkan dengan melaksananya sosialisasi peraturan Perundang-undangan dan mengirim ASN untuk mengikuti Bimtek.
- e. Terjaminnya kelancaran aktifitas dan administrasi kantor dengan menyediakan kebutuhan peralatan dan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan pelayanan terhadap tamu yang datang di Badan Penghubung.
- f. Terlaksananya pengurusan manajemen Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat terealisasi dan instansi lainnya dengan capaian 100%. Kegiatan pelayanan kelembagaan ini bertujuan untuk memfasilitasi koordinasi dan pengurusan kepentingan daerah ke Kementerian, Instansi/Lembaga Pusat serta menjalin komunikasi dan kerjasama dengan perantau dan generasi muda minang di perantauan.
- g. Terlaksananya promosi produk unggulan dan pelestarian terhadap budaya minangkabau termasuk terlaksananya pengelolaan Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia indah dengan baik walaupun di tengah pandemi Covid 19 namun promosi, pelayanan dan penyampaian informasi Sumatera Barat tetap diupayakan maksimal.
- h. Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa pelayanan tamu Pemerintah Daerah terealisasi dengan capaian 100%. Adapun indikator dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang aktifitas kedinasan kepala daerah, pejabat dan pimpinan terkait selama melaksanakan tugas di Jakarta dan diluar Sumatera Barat. Sarana dan Prasarana tersebut adalah kendaraan dinas operasional yang terawat beserta tenaga pengemudi (sopir) serta ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan.

**TABEL T-C.30  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Persentase aktifitas pejabat daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah yang dilayani.		Mewujudkan kelancaran kegiatan Pejabat Daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah.	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%		
2.	Persentase aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan.			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%		
3.	Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan.		Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat.	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	117%	-	12 kali	12 kali		
4.	Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan.			4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	100%	-	4 kali	4 kali		
5.	Nilai akuntabilitas kinerja OPD.		Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja organisasi.	Baik (66)	Baik (66)	Baik (68)	Baik (68)	95,18%	-	Baik (68)	Baik (68)		

4	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi.	Baik (78,20)	Baik (78,20)	Baik (78,84)	Baik (79)	108,95%	-	Baik (78,84)	Baik (79,00)
---	---	---	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	---------	---	-----------------	-----------------

### C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Ibu Kota Negara Jakarta. Secara garis besarnya pelaksanaan tugas tersebut mencakup segala aspek pemerintahan, sehingga pelaksanaan tugas seyogyanya harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sebagai “Duta Besar” Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kewenangan Badan Penghubung relatif kecil dikarenakan masih dipimpin oleh eselon III, sedangkan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Wakil Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta sangat kompleks, antara lain :

1. Menyelenggarakan urusan humas dan protokoler pejabat daerah di Jakarta dan diluar Provinsi Sumatera Barat.
2. Memfasilitasi hubungan kerja pejabat daerah dan koordinasi antar Kementerian/Non Kementerian dan Lembaga di Jakarta.
3. Penyelenggaraan urusan keuangan, perlengkapan dan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ada di luar Sumatera Barat.
4. Memfasilitasi dan menjembatani perantau minang yang ada di Indonesia maupun internasional dalam memberikan informasi mengenai Sumatera Barat.
5. Mempromosikan Sumatera Barat dalam bidang wisata, budaya dan investasi pada tingkat nasional dan internasional.

Sebagai informasi, perantau minang yang berjumlah sekitar 7 juta orang merupakan aset terbesar Sumatera Barat dalam percepatan pembangunan di Sumatera Barat. Dalam mengakomodir ide/partisipasi perantau minang ini diperlukan wadah dan anggaran yang cukup besar sehingga kedepannya kita dapat mewujudkan kolaborasi yang dinamis antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dengan perantau minang dalam memajukan pembangunan di Sumatera Barat.

Disamping tugas dan tanggungjawab diatas, sampai dengan tahun 2022 ini, Badan Penghubung telah banyak melaksanakan kegiatan yang sifatnya strategis meskipun ditengah keterbatasan ruang dan gerak karena pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia dan Dunia secara global maka hal ini berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan pada badan penghubung yang menyebabkan ada beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, antara lain :

1. Kegiatan Sumbar Expo yang sudah mendapatkan pengakuan dari media nasional dalam mempromosikan Sumatera Barat.
2. Kegiatan sosialisasi dan silaturahmi dengan perantau minang mengenai visi, misi dan program-program strategis daerah.
3. Kegiatan penyebaran informasi pembangunan melalui media cetak dan elektronik (siaran radio, Televisi, koran).
4. Menjadi penggagas dalam peningkatan kapasitas kelembagaan Badan Penghubung se-Indonesia dengan Kementrian PAN dan RB.

5. Ikut serta dalam berbagai kegiatan Kerjasama promosi potensi daerah dengan Kementerian terkait.
6. Optimalisasi fungsi Anjungan Sumatera Barat TMII sebagai etalase Pariwisata dan Budaya Sumatera Barat.

Gambaran Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan analisa SWOT yakni Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman/ tantangan) adalah sebagai berikut:

**a. Kekuatan (Strengths)**

Kekuatan yang dimiliki Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta, merupakan modal dasar yang mesti dipelihara dan ditingkatkan diantaranya adalah:

- a). Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- b). Bangunan kantor baru yang megah terdiri dari 13 lantai dengan arsitektur bagongjong di puncaknya merupakan simbol etnik dan kebanggaan masyarakat Minang terutama perantauan Minang di Jakarta.
- c). Lokasi kantor yang strategis, terletak di kawasan perempatan Matraman Raya, dan dapat dicapai dari berbagai penjuru dan memiliki akses lalu lintas ke tempat-tempat penting di kawasan DKI Jakarta.
- d). Aset/sumber daya masyarakat Minang di Jakarta yang cukup besar.
- e). Besarnya potensi daerah yang dapat “dijual” dipromosikan kepada masyarakat, investor baik dalam maupun luar negeri.
- f). Pengelolaan Anjungan Sumatera Barat TMII di Bawah Badan Penghubung sehingga membantu Badan Penghubung menjalankan tugas promosi dan penyampaian informasi mengenai pariwisata dan budaya Sumatera Barat .

**b. Kelemahan(Weaknesses)**

- a). Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dalam segi kuantitas maupun kualitas.
- b). Susahnya mendapatkan data dari daerah secara cepat dan akurat, sehingga mengganggu kualitas pelayanan informasi kepada pihak yang membutuhkan.
- c). Kapasitas kelembagaan yang mempengaruhi kewenangan.
- d). Kekurangan bahan-bahan promosi secara memadai tentang industri, kerajinan, kesenian, makanan, pariwisata, baik berupa benda, brosur-brosur, buku-buku, pamphlet maupun rekaman (CD).
- e). Kurang terjalin kerjasama yang optimal dengan pemerintah daerah (Kabupaten/Kota).

**c. Peluang (Opportunities)**

- a). Akses utama dalam informasi, teknologi dan transformasi disegala bidang.



- b). Banyaknya event promosi di Jakarta untuk pengenalan potensi daerah.
- c). Pusat Pemerintah dan kementerian berada di Jakarta.
- d). Jalur strategis untuk komunikasi dan koordinasi bagi semua perantau minang di Indonesia.

**d. Ancaman/Tantangan (Threats)**

- a). Persaingan di segala bidang dan promosi yang semakin ketat.
- b). Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan institusi pemerintah yang semakin tinggi.
- c). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin tinggi.

Disamping analisa SWOT diatas, dapat kami gambarkan aspek-aspek strategis Badan Penghubung lainnya dalam pelaksanaan tupoksinya, antara lain:

**Tabel 2.4**  
**Aspek Strategis Badan Penghubung**

No	Indikator	Aspek Strategis	Keterangan
1	2	3	4
1	Letak/Posisi	Di jalur strategis, Jln.Matraman Raya no.19, akses yang cepat ke Kantor Kementerian/Lembaga.	Satu gedung dengan Hotel Balairung dan Bank Nagari.
2	Sarana dan Prasarana	16 unit kendaraan dinas operasional roda 4, 4 unit kendaraan roda 2 dan peralatan serta perlengkapan kantor yang memadai.	Dalam melayani pejabat daerah yang bertugas di Jakarta.
3	Promosi dan Publikasi	Melalui media cetak serta elektronik, Sumbar TV dan Website Badan Penghubung.	Pada media elektronik RRI, TVRI, Padang TV dan internet.
4	Pelaksanaan tugas pemerintahan	Lokasi Kementrian/Lembaga yang berpusat di Jakarta memudahkan dalam koordinasi pelaksanaan tugas.	Percepatan dalam proses administrasi urusan pemerintahan.
5	Sosial budaya	Komunikasi yang intens dengan Bakor/Paguyuban perantau minang yang ada/berpusat di Jakarta.	Selalu ikut serta secara aktif dalam berbagai kegiatan sosial budaya serta keagamaan dengan perantau minang.
6	Pariwisata	Anjungan Sumatera Barat TMII yang berada dibawah pengelolaan Badan Penghubung.	Memudahkan promosi dan penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat.

Sumber : Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, 2022

Disamping aspek strategis tersebut serta berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2022

terdapat beberapa kendala/permasalahan yang perlu pertimbangan dalam menindaklanjutinya, antara lain :

1. Dalam Pelaksanaan tugas Badan Penghubung dalam hal hubungan antar lembaga, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :
  - a. Masih belum optimalnya pelaksanaan kegiatan dialog melalui media televisi dan radio, sehingga informasi yang disampaikan belum efektif dalam memberikan wawasan dan pemahaman masyarakat Sumatera Barat (perantau) untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
  - b. Masih belum terfasilitasi dengan baik kesepakatan diantara para Bakor Minang di Jakarta dan sekitarnya dalam memberikan ide-ide/masukan sebagai bentuk partisipasi dalam Musrenbang Provinsi.

Solusi yang diharapkan adalah :

- a. Perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas dalam pencapaian sasaran terhadap kegiatan dialog radio dan televisi, sehingga kedepannya, dapat membawa manfaat dalam meningkatkan wawasan masyarakat minang mengenai program-program pembangunan di Sumatera Barat.
  - b. Perlu dilakukan evaluasi terhadap kegiatan, baik dalam penentuan tema, bentuk acara serta sasaran yang akan dicapai, sehingga apa yang dibutuhkan oleh perantau minang dalam hal menyampaikan ide-ide/masukan dapat difasilitasi oleh Badan Penghubung.
2. Permasalahan di Badan Penghubung dalam melaksanakan tugas rutin pelayanan tamu, adalah sebagai berikut :
    - a. Masih kurangnya pelatihan untuk tenaga protokoler di Badan Penghubung dalam pelayanan dan fasilitasi kegiatan pimpinan/pejabat daerah.
    - b. Masih belum efektifnya pelaksanaan Pergub Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2006 mengenai pelayanan tamu dan pimpinan (perlu direvisi).

Alternatif solusi untuk permasalahan ini adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan Badan Diklat Provinsi Sumbar dan Kemendagri dalam rencana pelaksanaan diklat keprotokolan.
- b. Menyusun revisi Pergub mengenai pelayanan tamu dan pimpinan sesuai dengan standar operasioanal dan prosedur serta sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### **D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Pada rancangan awal RKPD, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam perencanaan program dan kegiatannya mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Pada Rancangan Awal RKPD dan dibandingkan dengan analisis kebutuhan Tahun 2022, terdapat beberapa perbedaan, yaitu:

1. Terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami perubahan belanja sesuai dengan kebutuhan tahun berjalan namun tidak mengubah indikator capaian.

2. Terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami perubahan sesuai dengan kondisi tahun berjalan yang menyebabkan perubahan pada indikator capaian seperti pada sub kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang pada awalnya indikator capaiannya 35 orang menjadi 6 orang, sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya pada awalnya 3 unit bertambah dengan pemeliharaan plang nama badan penghubung, pada sub kegiatan peningkatan pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat mengalami perubahan pada indikator capainnya dari 50 buah menjadi 90 buah.

Disamping hal tersebut diatas, masih terdapat beberapa perencanaan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung yang tidak dapat dilaksanakan, antara lain:

1. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas pelayanan dan keprotokolan, keterbatasan jumlah tenaga pengemudi menjadi masalah utama, dikarenakan jumlah pengemudi tidak seimbang dengan jumlah kendaraan dan intensitas tamu yang dilayani. Hal ini telah kami tindak lanjuti dengan mengusulkan anggaran untuk tenaga outsourcing/alih daya untuk tenaga pengemudi pada Tahun 2012 dan 2013, namun belum dapat direalisasikan dikarenakan Pergub yang mengatur tenaga outsourcing sopir belum ada. Selanjutnya, pada Tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 hingga tahun 2022 ini dianggarkan kembali untuk pengadaan Jasa tenaga sopir sehingga dapat memenuhi kuantitas sopir yang ada dalam pelayanan tamu dan pimpinan daerah.
2. Berkaitan dengan hubungan sosial kemasyarakatan, khususnya bagi perantau minang yang terlantar di Jakarta, Badan Penghubung merupakan sarana/destinasi untuk mengutarakan/minta bantuan terhadap keluhan/masalah yang sedang mereka hadapi, namun pada Badan Penghubung tidak mengganggu kegiatan yang bersifat bantuan, sehingga selama ini kami hanya berinisiatif membantu secara pribadi/kelompok.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat perbedaan jumlah anggaran yang direncanakan dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Pada dasarnya hal tersebut tidak mempengaruhi kinerja Badan Penghubung, dikarenakan dari hasil evaluasi program dan kegiatan, pada realisasi keuangan mencapai 93,22% penyerapan dananya. Artinya, Badan Penghubung dapat merealisasikan seluruh program dan kegiatannya (fisik : 100%), namun secara keuangan masih dalam proses pengajuan dan pencairan.

Adapun review terhadap Rancangan Awal Renja Badan Penghubung Tahun 2022 tersaji pada Tabel T-C.31 berikut ini :

TABEL T-C.31  
 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA BADAN PENGHUBUNG TAHUN 2022  
 PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	18.128.542.082	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		Persentase ketercapaian penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100%	12.401.316.252	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya perencanaan dan evaluasi kinerja Badan Penghubung	100%	146.045.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah.	100%	70.401.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jakarta	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RKT, PK, PK Perubahan, RKA, RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA, Renstra dan Renja Badan Penghubung.	9 dokumen	21.045.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jakarta	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Badan Penghubung yang disusun.	2 dokumen	3.405.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jakarta	Koordinasi dan penyusunan DPA Badan Penghubung.	4 kali	45.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jakarta	Jumlah Dokumen DPA Badan Penghubung yang disusun.	1 dokumen	30.323.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jakarta	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA Badan Penghubung.	4 kali	45.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jakarta	Jumlah dokumen perubahan DPA Badan Penghubung yang disusun.	1 dokumen	30.323.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jakarta	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah(LAKIP, LPPD, LKPJ, Laporan Tahunan)	4 dokumen	35.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Jakarta	Jumlah dokumen Evaluasi (Realisasi Kinerja, LAKIP, LPPD, LKPJ) Badan Penghubung yang disusun.	4 dokumen	6.350.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Meningkatnya administrasi umum kantor di Badan Penghubung	100%	9.566.231.082	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Keuangan di Badan Penghubung.	100%	6.150.218.394	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jakarta	Gaji dan Tunjangan ASN Badan Penghubung yang dibayarkan dalam 1 tahun.	54 orang	9.110.222.082	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Jakarta	Jumlah ASN Badan Penghubung dan calon ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya.	54 orang	5.869.749.394	

6





Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.		Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan.	1 unit	500.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jakarta	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru	1 unit	500.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jakarta	Pembuatan PC Konten Kreator dan Website Badan Penghubung. Peralatan dan Mesin Gedung Kantor yang diadakan.	1 paket 20 unit	271.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jakarta	Jumlah PC konten kreator dan website Badan Penghubung.  Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru.	1 paket 20 unit	388.211.200
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	Sewa Kantor, Rumah Jabatan dan Mess Karyawan yang tersedia selama 1 tahun.	12 bulan	2.293.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang disewa (kantor, rumah jabatan dan mess karyawan).	3 unit	1.390.790.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	Pembangunan Pos Satpam, Tempat Parkir Motor dan Landscape di Anjungan Sumatera Barat TMII.	1 paket	300.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (pos satpam, tempat parkir motor dan landscape di Anjungan Sumatera Barat TMII).	2 paket	153.711.499
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Meningkatnya pelayanan administrasi kantor di Badan Penghubung</b>	<b>95%</b>	<b>2.141.066.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.236.818.309</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jakarta	Terdistribusinya surat-surat kantor	185 kali	27.146.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jakarta	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun.	185 surat	11.919.809
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jakarta	Rekening tagihan yang dibayarkan (telepon, air, listrik, internet, VVN-IP, SIPKD, TV Kabel).	12 bulan	435.930.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jakarta	Jumlah tagihan air yang dibayarkan.  Jumlah tagihan internet dan VVN-IP yang dibayarkan.  Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan.  Jumlah Tagihan telepon yang dibayarkan.  Jumlah tagihan TV kabel yang dibayarkan.	5300 meter kubik 100 mbps 180.000 KVA 5 rekening 2 unit	397.152.500
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jakarta	Dukungan penerapan new normal.  Honarium petugas teknis lapangan.  PTT.	12 bulan 12 bulan 12 bulan	1.677.990.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jakarta	Dukungan penerapan new normal  Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	12 bulan 31 orang	1.827.746.000



	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jakarta, Bogor, Yogyakarta	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan Badan Penghubung.	12 bulan	250.000.000	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jakarta, Bogor, Yogyakarta	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan Badan Penghubung.	12 bulan	50.000.000	
	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jakarta, Provinsi lainnya	Ceramah Agama bagi Aparatur dan Masyarakat Rantau Sumatera Barat  Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga/Lemba ga Asing dan Pemerintah Provinsi lainnya  Pembinaan Generasi Muda Rantau Sumatera Barat Rapat Koordinasi Badan Penghubung se Indonesia	2 kali  12 bulan  2 kali 1 kali	980.954.000	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jakarta, Provinsi lainnya	Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga/Lembaga Asing dan Pemerintah Provinsi lainnya  Pembinaan Generasi Muda Rantau Sumatera Barat Rapat Koordinasi Badan Penghubung se Indonesia  Sosialisasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Perantau dan Masyarakat serta Pemangku Kepentingan Lainnya.	6 kali  2 kali 1 kali 2 kali	527.433.151	
	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jakarta	Meningkatkan Promosi Potensi dan Penyebaran Informasi Daerah diluar Sumatera Barat.	6 kali	775.104.900	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jakarta	Meningkatkan promosi potensi dan penyebaran informasi daerah diluar Sumatera Barat.	6 kali	489.003.778	
	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jakarta	Penyelenggaraan Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah.	2 kali	665.900.000	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jakarta	Penyelenggaraan Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah	2 kali	240.780.600	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jakarta, Provinsi lainnya	Media Informasi dan Publikasi Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah di luar Sumatera Barat.  Penyelenggaraan dan Koordinasi Sumbar Hub.  Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan.	12 bulan  12 bulan 12 bulan	1.379.807.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jakarta, Provinsi lainnya	Media informasi dan Publikasi Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah di luar Sumatera Barat.  Penyelenggaraan dan Koordinasi Sumbar Hub.  Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan.	12 bulan  12 bulan 12 bulan	769.612.438	

## E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya, Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Jakarta. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut, Badan Penghubung harus melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan semua stakeholders yang ada di Jakarta dan sekitarnya termasuk para perantau minang (masyarakat). Selama pelaksanaan berbagai kegiatan, Badan Penghubung secara *continue* menjalin hubungan silaturahmi/emosional dengan perantau minang yang ada di Jakarta bahkan se-Indonesia, namun berkaitan dengan usulan/masukan yang sering dikemukakan oleh para perantau minang dalam sosialisasi, rapat, kegiatan sosial lainnya, Badan Penghubung bertugas memberikan arahan, koordinasi dan fasilitasi lintas vertikal dan horizontal dengan pimpinan/OPD terkait mengenai masukan, ide dan usulan dari masyarakat minang yang berada di luar Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan untuk tindak lanjut dari usulan tersebut akan dibahas pada Musrenbang Provinsi dan dijadikan usulan program/kegiatan pada OPD terkait/sesuai dengan tupoksinya.

Ada beberapa usulan masyarakat/perantau minang sebagai masukan dalam mengoptimalkan kinerja Badan Penghubung, antara lain :

1. Badan Penghubung hendaknya dapat memfasilitasi masyarakat minang (perantau minang) yang mengalami kesulitan secara materi dan hidup terlantar di Jakarta.
2. Mahasiswa asrama Yogyakarta, khususnya asrama mahasiswa Bundo Kandung yang dihuni oleh mahasiswi minang terlalu jauh lokasinya dengan tempat perkuliahan (kampus). Kedepannya, asrama putra dan putri hendaknya di tempatkan pada lokasi yang sama (berdekatan dengan asrama putra/Merapi Singgalang).
3. Untuk mengakomodir banyaknya mahasiswa minang yang kuliah di beberapa kota besar lainnya seperti Semarang, Surabaya, Bandung diharapkan kedepannya Pemerintah Sumatera Barat untuk dapat memfasilitasi Asrama bagi mahasiswa di kota diatas seperti asrama yang sudah ada di Bogor dan Yogyakarta.
4. Untuk kegiatan yang sifatnya bantuan bencana alam (tanggap darurat) khususnya bagi perantau minang di Jabodetabek hendaknya dapat di akomodir dalam penganggaran Badan Penghubung.
5. Pelaksanaan kegiatan yang berbentuk promosi budaya, wisata dan investasi hendaknya di akomodir oleh Badan Penghubung, sehingga efektivitas dan efisiensi anggaran dapat lebih di optimalkan.

### BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024

#### A. TELAAHAN TERHADAP KAJIAN DAERAH

Menyikapi kondisi dan dinamika pemerintahan dan masyarakat baik secara regional maupun global maka diperlukan sebuah perencanaan yang berfungsi sebagai pengendali untuk kelanjutan dan perbaikan kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan perannya dengan memperhatikan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang telah di tuangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan penghubung Tahun 2021-2026.

Sehubungan dengan hal diatas kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta, dan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang merupakan salah satu pelaku pembangunan yang di harapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian harapan terhadap terwujudnya pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang dicita-citakan menjadi maju dan mandiri yang ditekankan pada meningkatnya kemampuan pemerintah daerah, yang salah satunya dapat ditafsirkan sebagai harapan terhadap semakin meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam menjalin hubungan kerja maupun kerja sama antar lembaga dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

**Tabel 3.1**  
**Kebijakan Umum dan Program Prioritas**  
**Badan Penghubung**

PERMASALAHAN 2016-2021	ISU STRATEGIS 2021-2026	TUJUAN 2021-2026
Belum optimalnya fasilitasi hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah lainnya serta pemangku kepentingan lainnya.	Pengalihan tugas pengelolaan rantau ke Badan Penghubung.	1. Meningkatnya kinerja birokrasi. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
Belum optimalnya Promosi Potensi Daerah Sumatera Barat diluar Daerah Sumatera Barat.	Intensitas frekuensi kunjungan dan kegiatan yang akan difasilitasi tidak diprediksi.	
Belum dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap penduduk Sumatera Barat di luar daerah dalam mengatasi permasalahan sosial (belum ada rumah singgah dan lain lain).	Kapasitas lembaga yang terbatas dibandingkan dengan peran yang dituntut baik oleh masyarakat, lembaga daerah dan pemerintah pusat serta stakeholder lainnya.	
Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Badan Penghubung.	Belum adanya ketentuan/regulasi yang mengatur tentang pengelolaan rantau.	

**Tabel 3.2**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Badan Penghubung**  
**Tahun 2021 – 2026**

STRATEGI 2021-2026	ARAH KEBIJAKAN 2021-2026
Mengintensifkan koordinasi lintas sektor dengan Kementerian/Lembaga/Instansi, Paguyuban/Organisasi Perantau Minang serta SKPD dan memfasilitasi promosi Provinsi Sumatera Barat dalam mengoptimalkan kinerja dan pencapaian sasaran pembangunan.	Peningkatan kualitas pelayanan publik masyarakat.
Meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.	Fasilitasi promosi potensi pembangunan daerah kepada pemangku kepentingan lainnya.
Penataan pengelolaan rantau.	Fasilitasi aktivitas/kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan pemangku kepentingan lainnya.
	Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelayanan penghubung.
	Penyusunan regulasi dalam rangka pemberdayaan potensi rantau dalam pembangunan daerah.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat sebagai SKPD yang memiliki fungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penghubung serta pembinaan dan fasilitasi bidang penghubung lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki arti yang strategis dalam menghubungkan kepentingan daerah dengan pemerintah pusat di Jakarta.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan prioritas RPJMD Tahun 2021-2026, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat melaksanakan beberapa program sebagai upaya pencapaian sasaran dan mewujudkan visi dan misi pembangunan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Pelayanan Penghubung.

## B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat terpilih periode 2021 - 2026 adalah :

**“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN”**

Dari visi tersebut di atas juga telah ditetapkan misi untuk mencapai visi tersebut sebanyak 7 misi, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;

2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Dari tujuh misi Gubernur dan Wakil Gubernur diatas, keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat akan mempengaruhi misi ketujuh, yaitu ***Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.***

Sedangkan untuk tujuan dan sasaran dari Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai pedoman perencanaan pembangunan tahunan dalam melaksanakan program/kegiatan pada tahun berikutnya (Tahun 2024).
2. Untuk menetapkan target dan capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung.
3. Sebagai salah satu sarana/wadah dalam menampung aspirasi masyarakat yang didapat dari evaluasi program/kegiatan tahun sebelumnya.

**Tabel 3.3**  
**Indikator Program Badan Penghubung Tahun 2021 – 2026**

Program Pembangunan Daerah 2021-2026	Indikator Kinerja Program 2021-2026	Satuan	Kondisi Awal 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Program Pelayanan Penghubung	Persentase fasilitasi Pelayanan yang dilaksanakan Badan Penghubung.	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase promosi daerah yang dilaksanakan.	%	100	100	100	100	100	100
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.	%	100	100	100	100	100	100

Tabel 3.4  
Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Penghubung  
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026

Sasaran 2021-2026	Indikator Kinerja Sasaran 2021 - 2026	Satuan	Kondisi Awal 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan Lembaga non pemerintah yang dilayani.	Persentase aktifitas pejabat daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan Lembaga non pemerintah yang dilayani.	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.	%	100	100	100	100	100	100
Meningkatkan koordinasi dengan perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di perantauan.	Promosi potensi daerah Sumatera Barat dan penyebaran informasi daerah yang dilaksanakan dengan baik.	kali	10	12	12	12	12	12
	Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan.	kali	2	4	4	4	4	4
Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan diluar Provinsi Sumatera Barat.	Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat.	Kali	12	12	12	12	12	12
	Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat.	Kali	12	12	12	12	12	12
	Jumlah pelaksanaan pemberian informasi potensi daerah Sumatera Barat.	Kali	12	0	0	0	0	0
Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja organisasi.	Nilai akuntabilitas kinerja OPD.	Skor	B (64)	B (66)	B (66)	B (68)	B (68)	B (70)
Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi.	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi.	Skor	Baik 77,70	Baik 78,20	Baik 78,20	Baik 78,84	Baik 79,00	Baik 80,00

Dari uraian tujuan diatas, **sasaran** yang diharapkan dari penyusunan Renja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini adalah untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sehingga target dan hasil yang telah ditetapkan dapat dicapai seoptimal mungkin.

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA**  
**DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**A. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024**

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.
- b. Pendayagunaan potensi ekonomi masyarakat Minang di Jakarta sebagai salah satu modal/aset dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah.
- c. Pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat.
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pimpinan daerah dengan Pemerintah Pusat, instansi non pemerintah dan pemerintah daerah lainnya

**B. USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024**

Untuk tahun anggaran 2024 dan prakiraan tahun 2025 Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat mengusulkan program-program kerja dan kegiatan dengan rincian berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 sesuai dengan tabel berikut ini :

Tabel 4.1  
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG

Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan			
		BADAN PENGHUBUNG						16.115.480.000,00		
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						16.115.480.000,00		
5 07		PENGELOLAAN PENGHUBUNG						16.115.480.000,00		
5 07 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						12.056.616.000,00		
5 07 01 1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						62.225.000,00		
5 07 01 1.01 0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	8 Dokumen	100 %	41.873.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5 07 01 1.01 0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	18 Laporan	100 %	13.851.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5 07 01 1.01 0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	100 %	6.501.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

5	07	01	1.02	0001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.760.711.396,00			
5	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
					Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	50 Orang/ Bulan	100 %	6.608.245.396,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	07	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
					Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	12 Dokumen	100 %	140.460.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	07	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD							
					Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	18 Laporan	100 %	12.006.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	07	01	1.03	0002	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				110.772.000,00			
5	07	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
					Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	29 Dokumen	100 %	108.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	07	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD							
					Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	3 Laporan	100 %	1.180.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	07	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
					Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	3 Laporan	100 %	1.392.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)







5	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100 %	1 Laporan	100 %	398.910.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
					Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					
5	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 %	1 Laporan	100 %	2.236.926.532,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
					Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					
5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							840.074.312,00	
5	07	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100 %	20 Unit	100 %	293.654.312,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
					Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perzinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					
5	07	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100 %	86 Unit	100 %	65.860.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
					Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					
5	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100 %	4 Unit	100 %	364.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
					Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					
5	07	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100 %	3 Unit	100 %	116.560.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
					Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					





## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Penyusunan Renja Tahun 2024 lebih bersifat operasional sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud, sehingga akan diperoleh peningkatan kualitas perencanaan sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Startegis (RENSTRA) Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya Renja akan menjadi pedoman penyusunan RKA Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*tirckle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja (RENJA) Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat adalah Program Tahunan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program. Rencana Kerja (RENJA) Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang.

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi dan menjadi catatan penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya adalah :

1. Dalam Pelaksanaan tugas Badan Penghubung dalam hal hubungan antar lembaga, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :
  - a. Masih belum optimalnya pelaksanaan kegiatan dialog melalui media televisi dan radio, sehingga informasi yang disampaikan belum efektif dalam memberikan wawasan dan pemahaman masyarakat Sumatera Barat (perantau) untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
  - b. Masih belum terfasilitasi dengan baik kesepakatan diantara para Bakor Minang di Jakarta dan sekitarnya dalam memberikan ide-ide/masukan sebagai bentuk partisipasi dalam Musrenbang Provinsi.

Solusi yang diharapkan adalah :

- a. Perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas dalam pencapaian sasaran terhadap kegiatan dialog radio dan televisi, sehingga kedepannya, dapat membawa manfaat dalam meningkatkan wawasan masyarakat minang mengenai program-program pembangunan di Sumatera Barat.
  - b. Perlu dilakukan evaluasi terhadap kegiatan, baik dalam penentuan tema, bentuk acara serta sasaran yang akan dicapai, sehingga apa yang dibutuhkan oleh perantau minang dalam hal menyampaikan ide-ide/masukan dapat difasilitasi oleh Badan Penghubung.
2. Permasalahan di Badan Penghubung dalam melaksanakan tugas rutin pelayanan tamu, adalah sebagai berikut :
- a. Masih kurangnya pelatihan untuk tenaga protokoler di Badan Penghubung dalam pelayanan dan fasilitasi kegiatan pimpinan/pejabat daerah.
  - b. Masih belum efektifnya pelaksanaan Pergub Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2006 mengenai pelayanan tamu dan pimpinan (perlu direvisi).
- Alternatif solusi untuk permasalahan ini adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi dengan Badan Diklat Provinsi Sumbar dan Kemendagri dalam rencana pelaksanaan diklat keprotokolan.
  - b. Menyusun revisi Pergub mengenai pelayanan tamu dan pimpinan sesuai dengan standar operasioanal dan prosedur serta sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai fokus dan sasaran yang cukup kompleks, kedepannya Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat berharap dapat dijadikan **First Destination** dalam menyajikan informasi, promosi, dan nilai jual bagi Sumatera Barat pada tingkat nasional dan internasional di Jakarta. Namun, terlepas dari tujuan dan cita-cita dalam mengharumkan nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tidak henti-hentinya untuk terus melakukan perbaikan/pengembangan secara internal organisasi dan eksternal menuju organisasi yang profesional, mempunyai akuntabilitas dan transparansi serta bebas dari KKN.

Adapun harapan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan cita-citanya tersebut tidak lepas dari dukungan stakeholders (eksekutif, legislatif dan masyarakat), seperti kata pepatah "Barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang".

**KEPALA BADAN PENGHUBUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc.Sc,Ph.D**

Pembina TK I/NIP.19800904 199810 1 002